

## ABSTRAK

Nina Motiva Hanna Ali (00000024206)

### **PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1395 K/PDT/2017)**

(xii + 113 halaman : 1 lampiran)

Ajaran penyalahgunaan keadaan telah dikenal dan bukanlah hal yang baru di Indonesia, walaupun belum ada pengaturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini, namun dalam perkembangannya, penggunaan ajaran penyalahgunaan keadaan ini telah diterapkan dalam berbagai perkara yang masuk proses pengadilan. Secara faktual, Indonesia mengadopsi ajaran penyalahgunaan keadaan dalam bentuk doktrin, aturan dalam NBW (*nieuw burgerlijk wetboek*) dan menerapkannya dalam perkara-perkara yang memang berkenaan dengan itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi yang ada terkait dengan perbuatan penyalahgunaan keadaan ini.

Ciri-ciri penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penyalahgunaan keadaan ekonomis dan penyalahgunaan keadaan kejiwaan. Pertimbangan hakim dalam dalam memutus para tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap para penggugat dikarenakan penggugat sedang terpuruk keadaan ekonominya dan notaris ikut bersekongkol dalam membuat perjanjian-perjanjian yang merugikan pernggugat.

Walaupun perbuatan penyalahgunaan keadaan tidak diatur secara spesifik di dalam kode etik notaris, namun bukan berarti bahwa notaris dapat melakukan perbuatan tersebut tanpa dikenakan sanksi yang telah diatur di dalam kode etik notaris. Perbuatan penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan ke dalam pasal 3 kode etik notaris yang berbunyi antara lain, dalam menjalankan tugasnya notaris wajib menyadari kewajibannya, bekerja, mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menganalisis data yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan, selain itu, metode penelitian hukum ini dilakukakn dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yang tidak terlalu mementingkan kuantitas datanya tetapi lebih mementingkan kedalamannya lalu kemudian disajikan secara deskriptif.

Kata kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Kode Etik Notaris

Referensi : 36 (1983-2017)

## ABSTRACT

Nina Motiva Hanna Ali (00000024206)

**UNDUE INFLUENCE (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)  
CONDUCTED BY A NOTARY (CASE STUDY : THE SUPREME COURT  
RULING NO. 1395K/PDT/2017)**

(xii + 113 pages: 1 attachment)

Undue influence (*Misbruik van omstandigheden*) has been known and is not something new in Indonesia, even though there is no regulation that regulates regarding this matter; nonetheless, the use of the doctrine has been applied in a various court of justice. In fact, Indonesia has adopted the undue influence teaching that regulates in NBW (*nieuw burgerlijk wetboek*) and applies it as a doctrine. Indonesia applies this doctrine and uses it for the related cases based on the undue influence jurisprudence.

The undue influence characteristics is divided into 2 (two) main characters, the economical undue influence and the psychological undue influence, the judges consideration in order to make the undue influence decision is because the plaintiffs are pressuring the defendants to sign the contracts under the economic duress and the notaries are conspiring with the plaintiffs to do so.

Even though the undue influence is not specifically regulated in the notary code of conduct, that doesn't mean that the notary could do such action without being penalized. In the article 3 of the notary code of conduct is mentioning among others; notary, in carrying their duties shall be obliged to their obligations, working, independent, honest, non alignment and fully responsible. Hence, the undue influence could be related to this article.

The methodology applied in this research is normative jurisdiction of which uses data analysis based on the norms, the laws and jurisprudences. Furthermore, this research is conducted by the qualitative approaches, which is not too concerned with the data quantity, but prioritizing the depth of its data and served in a descriptive.

Keywords : Undue Influence, Ethics Code

References : 36 (1983-2017)